



BAB 2

EVALUASI HASIL RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) SAMPAI TRIWULAN I

Secara umum, maksud dan tujuan Pengendalian dan Evaluasi RKPD Provinsi Kalimantan Timur Triwulan I Tahun 2015 adalah untuk :

- a. Memperoleh gambaran konsistensi perencanaan dan penganggaran SKPD Tahun 2015.
- b. Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan anggaran RKPD Provinsi Kalimantan Timur s.d. Triwulan II Tahun 2015.
- c. Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan anggaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 s.d. Triwulan I Tahun 2015.
- d. Merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk dipergunakan sebagai masukan dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2015.
- e. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018.

Hasil evaluasi RKPD Provinsi Kalimantan Timur s.d. Triwulan I Tahun 2015 digunakan sebagai :

- a. Masukan untuk penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015;
- b. Indikator penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. Indikator penilaian kinerja SKPD; dan
- d. Bahan penilaian pencapaian rencana aksi program dan kegiatan pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.



2.1. EVALUASI TARGET DAN REALISASI INDIKATOR RKPD 2015 (TRIWULAN I)

Untuk memperoleh gambaran capaian kinerja SKPD yang bersangkutan pada Triwulan I Tahun 2015 maupun capaian Renstra SKPD masing-masing SKPD s.d. Triwulan I Tahun 2015, juga dilakukan evaluasi hasil Renja

Sumber data dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi ini adalah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018, Renstra SKPD Tahun 2015-2018, RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015, Renja SKPD Tahun 2015, DPA SKPD Tahun 2015, hasil evaluasi Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan Tahun 2015, dan laporan Tim Evaluasi Penyerapan Anggaran Provinsi Kalimantan Timur Triwulan I Tahun 2015.

Pengendalian dan Evaluasi dilakukan dengan membandingkan judul, indikator, target, pagu setiap program/kegiatan pada setiap dokumen perencanaan maupun dokumen anggaran. Sedangkan evaluasi hasil dilakukan dengan membandingkan antara target yang ditetapkan dalam Renstra/Renja SKPD dengan realisasi pelaksanaan DPA SKPD.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2014 tentang RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015, tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel, 2.1
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Prov. Kaltim tahun 2015

No.	Tujuan	Sasaran
1.	Meningkatkan Kualitas SDM Kaltim	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia pada tingkat 77,14;• Meningkatnya angka melek huruf menjadi 98,30%;• Meningkatnya rata-rata lama sekolah menjadi 10,50 tahun;• Meningkatnya angka harapan hidup menjadi 71,75 tahun;• Meningkatnya pendapatan perkapita menjadi Rp 48,65 juta.



No.	Tujuan	Sasaran
2.	Meningkatkan Kesejahteraan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none">• Menurunnya tingkat kemiskinan sebesar 5,75%• Menurunnya tingkat pengangguran sebesar 7,00%• Menurunnya Indeks Gini pada skala 0,34;• Meningkatnya daya beli masyarakat dengan tingkat inflasi pada tingkat 6,30% \pm dan paritas daya beli sebesar Rp. 724.450,-
3.	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Hijau	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sebesar 3,2-3,7% (LPE migas) dan 7,0-7,3% (LPE non migas);• Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam arti luas yang menjadi unggulan daerah sebesar 7,00%;• Tercapainya swasembada pangan sebesar 90,00%;• Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan sebesar 1,12%;• Meningkatnya nilai tambah produk unggulan daerah sebesar 7,7-8,0%.
4.	Menyediakan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar pada angka 6,00.
5.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	<ul style="list-style-type: none">• Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada skala 5,7 dan mempertahankan opini WTP oleh BPK;• Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik pada skala 75 (baik);• Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pada skala 74,00 (B+) dan predikat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah "sangat tinggi".
6.	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan pada skala 79,24; dan• Menurunnya tingkat emisi gas rumah kaca dari 1500 ton CO₂/US \$juta PDRB menjadi 1.458 ton CO₂/US \$ juta PDRB.



Berdasarkan tabel di atas, SKPD berkewajiban mendukung perwujudan seluruh tujuan pembangunan dimaksud. Di samping itu, secara khusus bertanggung jawab mewujudkan tujuan menyediakan infrastruktur dasar yang berkualitas dengan sasaran meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar pada angka 6,00. Oleh karena itu, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan menjadi amatlah penting.

Pengendalian dan evaluasi terhadap konsistensi pelaksanaan rencana pembangunan akan menjamin bahwa rencana pembangunan telah dilaksanakan secara terarah sehingga terwujud penggunaan anggaran yang efektif dan efisien. Evaluasi hasil akan memastikan bahwa target kinerja pada setiap program/kegiatan telah dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.

Disamping capaian target kinerja dan serapan anggaran, hal lain yang dievaluasi dalam pelaksanaan RKPD adalah indentifikasi terhadap faktor pendorong yang menyebabkan keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan maupun faktor-faktor yang menghambat keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan.

Faktor pendorong dan faktor penghambat diisi oleh setiap SKPD pada baris yang telah disediakan pada format evaluasi hasil Renja SKPD. Baris faktor pendorong diisi dengan uraian penjelasan ringkas terhadap faktor-faktor dominan yang mendorong tercapainya suatu target. Sedangkan baris faktor penghambat diisi dengan uraian penjelasan ringkas terhadap faktor-faktor dominan yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.

Identifikasi faktor pendorong dan faktor penghambat bermanfaat bagi keberhasilan pencapaian kinerja dan daya serap anggaran antara lain karena:

1. Lebih dini diketahui hal-hal yang mempengaruhi pencapaian target di akhir tahun anggaran sehingga dapat diambil langkah-langkah untuk perbaikan dan penyempurnaan.
2. Serapan anggaran dapat dioptimalkan untuk menjadikan APBD sebagai penggerak perekonomian daerah yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
3. Mempermudah pengkajian dan analisa tingkat capaian dan daya serap sehingga meningkatkan optimalisasi pelaksanaan kegiatan dan efisiensi anggaran.



4. Perencanaan tahap berikutnya memiliki data dan informasi yang akurat, sehingga perencanaan dan penganggaran dapat dilakukan dengan baik, efektif, dan efisien.

2.2. EVALUASI TARGET DAN REALISASI INDIKATOR OUTCOME DAN OUTPUT (TRIWULAN I)

Pada RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 Prioritas Pembangunan tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018. Prioritas pembangunan dalam penyusunan program pembangunan disesuaikan dengan isu strategis yang dihadapi pada tahun 2015 sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut:

1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan
 - a. Perluasan subsidi pendidikan bagi seluruh peserta didik dalam usia wajib belajar;
 - b. Peningkatan Relevansi dan mutu pendidikan;
 - c. Peningkatan kesempatan belajar anak
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
 - a. Peningkatan akses di bidang kesehatan;
3. Percepatan pengentasan kemiskinan
 - a. Pemberdayaan masyarakat dalam kemandirian bekerja
 - b. Penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin
4. Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja
 - a. Peningkatan kualitas tenaga kerja;
5. Pengembangan ekonomi kerakyatan
 - a. Pengarusutamaan gender;
 - b. Menjaga stabilitas harga dan efisiensi distribusi barang;
 - c. Peningkatan investasi sektor UMKM;
 - d. Menjaga ekspektasi masyarakat melalui transparansi harga
6. Percepatan transformasi ekonomi
 - a. Peningkatan investasi daerah dengan menciptakan iklim investasi yang berdaya saing global;
 - b. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ;



- c. Peningkatan nilai tambah produk pertanian dalam arti luas (integrasi produk hilir dan hulu);
 - d. Peningkatan ekspor produk olahan;
7. Pemenuhan kebutuhan energi ramah lingkungan
 - a. Peningkatan bauran energi baru dan terbarukan;
 - b. Peningkatan rasio elektrifikasi
8. Pengembangan Agribisnis
 - a. Meningkatkan ekspor produk olahan unggulan;
 - b. Penguatan mata rantai kawasan-kawasan agribisnis
 - c. Penerapan Inovasi Teknologi Agribisnis.
 - d. Pengembangan industri pengolahan produk unggulan
9. Peningkatan produksi pangan
 - a. Peningkatan areal pertanian melalui cetak sawah dan optimasi lahan;
 - b. Penerapan mekanisasi dan teknologi pertanian
 - c. Peningkatan tenaga kerja petani melalui program transmigrasi
 - d. Peningkatan infrastruktur pertanian;
 - e. Peningkatan produktivitas Pertanian;
 - f. Perbaikan tata niaga produk pertanian
10. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar
 - a. Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur transportasi;
 - b. Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur dan transportasi di kawasan Maloy, kawasan industri lainnya dan pusat pertumbuhan;
 - c. Peningkatan konektivitas antar kawasan industri dan pusat pertumbuhan
11. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah
 - a. Standarisasi rencana dan prosedur tiga prioritas focus;
 - b. Peningkatan kapasitas dan manajemen aparatur;
12. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
 - a. Perbaikan tata kelola dan perijinan pemanfaatan hutan dan lahan;
 - b. Peningkatan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dan luas tutupan lahan;
 - c. Penerapan konsep dan strategi pembangunan ekonomi (green economy) yang ramah



- d. Pemanfaatan lahan-lahan terdegradasi;
- e. Meningkatkan kualitas udara , perairan dan lingkungan hidup perkotaan ;
- f. dan lingkungan hidup perkotaan;
- g. Penegakan hukum lingkungan;
- h. Pengarusutamaan perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan daerah

2.3. EVALUASI HASIL RKPD 2015 (TRIWULAN I)

Berdasarkan informasi yang disampaikan SKPD sebagaimana diuraikan di atas, maka diperoleh kesimpulan terkait dengan faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan RKPD, faktor penghambat pelaksanaan RKPD, dan tindak lanjut yang diperlukan untuk RKPD Perubahan Tahun 2015 sebagai berikut:

1. Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja:
 - a. Kualitas SDM yang memadai, memiliki komitmen dan motivasi untuk melakukan tugas dan fungsi secara maksimal
 - b. Ketersediaan anggaran yang memadai
 - c. Sarana dan prasarana kantor yang baik dan didukung dengan teknologi dan informasi yang memadai dan mendukung kinerja di lapangan
 - d. Komitmen pimpinan daerah terhadap program kesehatan
 - e. Program dan kegiatan yang relevan dan terintegrasinya sehingga memudahkan dalam pencapaian sasaran program/Kegiatan tersebut
 - f. Jadwal pelaksanaan kegiatan tersusun dengan baik, menjadi pedoman dalam pelaksanaan setiap bulan
 - g. Koordinasi SKPD yang baik
 - h. Anggaran yang disyahkan diawal tahun sehingga waktu pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih cepat
 - i. Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP)
2. Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja:
 - a. Kualifikasi dan kuantitas SDM yang belum memadai
 - b. Persepsi Stake holder yang kurang tepat terhadap konsep pembangunan di bidang urusan kesehatan



- c. Belum terstandarisasinya pelaksanaan kegiatan (misalnya ISO 9001 : 2008)
 - d. Kerjasama lintas program yang belum tercapai
 - e. Peraturan yang membatasi kewenangan daerah, jadwal kegiatan menyesuaikan pusat dan pembayaran termin ke pihak ketiga dan perubahan anggaran
 - f. Masih rendahnya produktivitas beberapa komoditas perkebunan bila dibandingkan dengan potensi produksinya dan adanya moratorium perizinan untuk pembangunan usaha perkebunan serta alokasi dana pembangunan infrastruktur pertanian yang tidak tersedia/ anggarannya terlalu kecil
 - g. Keluaran kegiatan yang pelaksanaannya oleh pihak ke-3, pada umumnya terealisasi keuangannya pada Triwulan III s/d IV.
 - h. Terlambatnya pengesahan anggaran SKPD dan revisi anggaran
 - i. Masalah sosial budaya yang menghambat pelaksanaan program/kegiatan (seperti pembebasan tanah, dll)
 - j. Kurang tersedianya alokasi dana untuk pembangunan secara maksimal
 - k. Validasi data yang berhubungan dengan kegiatan di Kab/Kota masih berjalan kurang optimal
 - l. Belum adanya komitmen yang kuat bagi pelaksana kegiatan terutama yang ada di Bidang Teknis untuk melaksanakan kegiatan berorientasi hasil berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan, dan tidak berpedoman pada schedule yang telah dibuat.
3. Tindak Lanjut:
- a. Penyelesaian sisa pekerjaan akan diusulkan pada TA 2015 dan diharapkan dapat terealisasi pada Tahun tersebut.
 - b. Dilakukan Evaluasi Renja dan Renstra sesuai ketentuan
 - c. Mengevaluasi program dan kegiatan yang capaian kinerjanya rendah.
 - d. Target kinerja Renstra / Renja harus bersifat terukur secara kuantitatif, sehingga prosentase capaian kinerja dapat dihitung/ditetapkan



4. Rekomendasi

- a. Hasil pengendalian dan evaluasi yang diperoleh menjadi salah satu alasan untuk melakukan perubahan Perubahan RKPD dan Renja SKPD Tahun 2015.
- b. Format evaluasi harus diisi dengan benar sesuai dengan tatacara pengisiannya agar data dan informasi yang diperoleh valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur perlu melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dan melaporkannya secara tertib kepada kepala daerah melalui Bappeda Provinsi sebagaimana diamanatkan peraturan perundangan.
- d. Setiap bidang di lingkungan Bappeda menindaklanjuti hasil pengendalian dan evaluasi untuk memastikan terwujudnya visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana telah dirumuskan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018.